



Kolaborasi Sosial dalam Identifikasi Fakir Miskin: Studi Peran Ketua RT dan Panitia Zakat di Pedesaan

Muhammad Haris

Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru

Email: haris@diniyah.ac.id

Abstract

This study aims to understand the form and dynamics of social collaboration between the RT Head and the zakat committee in the process of identifying the poor in rural areas. The approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. The results of the study indicate that collaboration between the two local actors is based on social networks and community trust, but is also full of subjectivity in determining aid recipients. Although this practice strengthens sensitivity to local conditions, there are still limitations in transparency and potential for social bias. This study emphasizes the importance of combining local knowledge with a more accountable and inclusive formal identification system.

Keywords: *Social Collaboration, Identification of the Poor, RT Head, Zakat Committee*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk dan dinamika kolaborasi sosial antara Ketua RT dan panitia zakat dalam proses identifikasi fakir miskin di wilayah pedesaan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara kedua aktor lokal ini didasarkan pada jaringan sosial dan kepercayaan masyarakat, namun juga sarat dengan subjektivitas dalam penentuan penerima bantuan. Meskipun praktik ini memperkuat sensitivitas terhadap kondisi lokal, masih ditemukan keterbatasan transparansi dan potensi bias sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya penggabungan pengetahuan lokal dengan sistem identifikasi formal yang lebih akuntabel dan inklusif.

Kata Kunci: *Kolaborasi Sosial, Identifikasi Fakir Miskin, Ketua RT, Panitia Zakat Masyarakat.*

A. Pendahuluan

Di balik program-program bantuan sosial yang digulirkan oleh negara maupun lembaga keagamaan, terdapat satu tahapan yang sangat krusial dan menentukan: proses identifikasi penerima bantuan. Proses ini tidak semata-mata administratif, melainkan juga sarat makna sosial, karena menyangkut penentuan siapa yang berhak disebut sebagai "fakir miskin"¹. Dalam konteks pedesaan di Indonesia, proses ini kerap melibatkan aktor-aktor lokal seperti Ketua RT dan panitia zakat. Mereka tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga agen sosial yang menentukan arah distribusi keadilan². Di sinilah peran mereka menjadi menarik untuk ditelaah lebih jauh, terutama ketika keputusan yang diambil tidak hanya berbasis data formal, melainkan juga melalui intuisi sosial, jaringan pergaulan, dan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Permasalahan utama yang muncul dalam identifikasi fakir miskin adalah adanya celah antara indikator formal yang digunakan oleh pemerintah dan realitas sosial di lapangan³. Indikator seperti penghasilan, kepemilikan aset, dan jumlah tanggungan sering kali tidak mampu menangkap kompleksitas kemiskinan yang bersifat multidimensi⁴. Banyak warga yang secara administratif terlihat "mampu", namun dalam kehidupan sehari-hari mengalami kesulitan ekonomi yang tersembunyi. Sebaliknya, ada pula warga yang dianggap layak menerima bantuan karena faktor kedekatan

¹ Muhammad Haris, "Problematika Pemberdayaan Masyarakat Miskin," *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa* 2, no. 1 (2019): 46–63.

² Ahmad Afif Amrullah, Uswatun Chasanah Ach. Muhandis Mutiuddin, "Analisis Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Di Lazisnu Jawa Timur," *Jurnalekonomisyariah darussalam* 5, no. 1 (2024): 64–81.

³ Ahmad Maulana Anshori, Muhammad Haris, and Bayu Indra Laksana, "Digitalisasi Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaba Mikro Kecil Berbasis Potensi Lokal," 2025.

⁴ Ahmad Roziq, Yulinartati, and Norita Citra Yulianti, "Model Of Productive Islamic Social Fund Management For Poor Empowerment," *International Journal of Professional Business Review* 7, no. 5 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i5.e597>.



sosial atau politik dengan aparat setempat, meskipun secara objektif tidak tergolong fakir atau miskin⁵. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana proses identifikasi fakir miskin di desa dilakukan secara objektif dan adil? Bagaimana peran Ketua RT dan panitia zakat dalam menyaring dan menentukan nama-nama yang dianggap layak menerima bantuan?

Di beberapa desa, muncul perdebatan mengenai keabsahan proses seleksi penerima zakat atau bantuan sosial lainnya. Ketua RT sering kali dianggap sebagai tokoh yang paling memahami kondisi warganya, namun tidak jarang pula ia dituduh melakukan praktik nepotisme atau mengutamakan kelompok tertentu⁶. Sementara itu, panitia zakat sebagai bagian dari lembaga keagamaan kerap kali menghadapi dilema antara mengikuti kriteria syariah secara ketat atau menyesuaikan dengan kebutuhan lokal yang lebih fleksibel⁷. Di sinilah muncul ruang kolaborasi sekaligus potensi konflik antara dua aktor lokal ini. Ketika keduanya bekerja sama, apakah mereka dapat menciptakan sistem identifikasi yang lebih manusiawi dan kontekstual, atau justru meneguhkan praktik patronase yang sulit dikontrol?

Dalam studi kebijakan publik, kolaborasi antaraktor lokal sering kali dipandang sebagai bentuk desentralisasi yang memberi ruang pada partisipasi masyarakat⁸. Namun, dalam praktiknya, partisipasi ini tidak

⁵ Mardhiyah Hayati, "Peran Pemerintah Dan Ulama Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pendidikan Di Indonesia," *DosenFakultasSyariahIAINRadenIntanLampung*, March 23, 2014, 1–9.

⁶ Mohamad Naimi Mohamad Nor, Suhaimi Ishak, and Amirul Faiz Osman, "Developing An Effective Individual Amil Criteria," *International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam* 3, no. 6 (March 31, 2021): 38–44, <https://doi.org/10.35631/irjsmi.36004>.

⁷ Abdalrahman Migdad, "Managing Zakat Through Institutions: Case of Malaysia," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 1 (2019): 28–44, <https://doi.org/10.25272/ijisef.519228>.

⁸ Muhammad Haris, "Interaksi Sosial dan Jaringan Ekonomi Pedagang Kaki Lima Dalam Konteks Perubahan Ekonomi Lokal," *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat* 9, no. 1 (2024): 84–98.

selalu bermakna inklusif. Di beberapa kasus, kolaborasi justru menjadi sarana reproduksi kekuasaan informal yang menguntungkan segelintir pihak⁹. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana mekanisme kolaborasi sosial ini terbentuk, dijalankan, dan dinegosiasikan dalam konteks identifikasi fakir miskin di desa. Penelitian ini hendak mengangkat dinamika tersebut melalui pendekatan kualitatif, dengan menggali pengalaman, pandangan, dan praktik dari para pelaku utama dalam proses identifikasi.

Penelitian ini secara khusus berupaya menjawab pertanyaan: Bagaimana bentuk dan dinamika kolaborasi sosial antara Ketua RT dan panitia zakat dalam proses identifikasi fakir miskin di desa Buluhcina? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut? Dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, penelitian ini akan mendalami cara para aktor lokal memahami peran mereka, menafsirkan kemiskinan, dan memutuskan siapa yang layak mendapat bantuan.

Kontribusi penelitian ini terbagi dalam dua ranah: pertama, kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian kebijakan sosial berbasis komunitas, khususnya terkait peran aktor informal dalam sistem kesejahteraan lokal. Kedua, kontribusi praktis bagi pemerintah desa dan panitia zakat dalam merancang mekanisme seleksi yang lebih akuntabel dan partisipatif. Dengan memahami praktik sosial di balik proses identifikasi, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih adil dalam pendistribusian bantuan.

Lebih jauh lagi, penelitian ini juga dapat memperkaya wacana tentang tata kelola lokal (*local governance*), dengan menyoroti bagaimana nilai-nilai kepercayaan, solidaritas, dan kewibawaan sosial dimainkan dalam kebijakan sosial tingkat desa. Peran Ketua RT dan panitia zakat bukan hanya

⁹ Lihi Lahat, Tanja Klenk, and Noga Pitowsky-Nave, "Street-Level Bureaucrats as Policy Entrepreneurs and Collaborators: Findings from Israel and Germany," *European Policy Analysis* 9, no. 4 (November 1, 2023): 397–417, <https://doi.org/10.1002/epa2.1173>.



administratif, tetapi juga simbolik, mereka menjadi penjaga norma sosial sekaligus pelaku seleksi yang bisa menentukan nasib warga¹⁰. Melalui studi ini, kita bisa melihat bagaimana lembaga formal dan nonformal bertemu dalam satu ruang sosial dan bagaimana dinamika kekuasaan, nilai, dan kebijakan berkelindan di dalamnya.

Dengan mendekatkan lensa pada level mikro, penelitian ini mengajak kita untuk memahami bahwa kebijakan sosial tidak hanya berhenti di meja rapat kementerian atau kepala daerah, tetapi hidup dan dinegosiasikan di balai desa, masjid, atau bahkan di teras rumah seorang Ketua RT. Di sanalah keadilan sosial diuji, tidak hanya melalui angka, tetapi melalui relasi manusia yang kompleks dan kadang-kadang kontradiktif

B. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif¹¹ dengan tujuan untuk memahami secara mendalam praktik kolaborasi sosial antara Ketua RT dan panitia zakat dalam proses identifikasi fakir miskin di Desa Buluhcina. Pendekatan ini dianggap paling tepat karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan respon masyarakat terhadap kolaborasi sosial antara Ketua RT dan panitia zakat dalam proses identifikasi fakir miskin¹². Penelitian ini akan mengadopsi desain penelitian fenomenologi. Pendekatan fenomenologi¹³ memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan dan memahami secara holistik untuk memperkaya literatur mengenai peran aktor informal dalam kebijakan sosial berbasis komunitas. Lokasi penelitian ini adalah Desa Buluhcina, Kecamatan Siak Hulu-Kampar yang secara konsisten setiap tahun selalu menyalurkan dana zakat melalui panitia zakat. Pemilihan lokasi

¹⁰ Salahuddin El Ayyubi et al., "Peran Zakat Terhadap Proses Perubahan Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Narrative Dan Bibliometrics," *AL-MUZARA'AH* 11, no. 1 (June 26, 2023): 63–85, <https://doi.org/10.29244/jam.11.1.63-85>.

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).

¹² Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2006).

¹³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

ini bertujuan tidak hanya memahami persoalan teknis identifikasi kemiskinan, melainkan juga menggambarkan bagaimana solidaritas, kuasa, dan moralitas berinteraksi dalam praktik keseharian masyarakat pedesaan. Informen penelitian akan dipilih dengan metode purposive¹⁴ yaitu Ketua RT dari enam RT yang berbeda dari dusun tiga dan dusun empat, enam orang panitia zakat dari satu masjid utama, Masjid Nur-Ikhlas di desa tersebut, Tokoh masyarakat seperti dua orang imam majid, dua orang tokoh yang dituakan dan aparat desa sebagai informan pendukung, masyarakat non-penerima zakat/bantuan sosial.

Adapun teknik pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam kepada 16 orang kepada informen yang telah disebutkan di atas. Dalam wawancara dengan informen juga melakukan FGD guna untuk menelaah secara mendalam tentang identifikasi dan penetapan masyarakat penerima bantuan¹⁵. Metode pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan purposive¹⁶, di mana informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria dan waktu serta momen tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun kriteria pemilihan informan mencakup individu, ketua RT yang beradaptasi langsung dengan masyarakat. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur. Pertanyaan diformulasikan untuk menggali pengalaman dan pandangan partisipan terkait kondisi fakir dan miskin. Observasi Terlibat: Observasi selama satu bulan penuh dilakukan untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang kondisi fisik dan ekonomi yang terjadi di lapangan¹⁷. Selanjutnya Data wawancara dan observasi akan dianalisis menggunakan analisis dekriptif kualitatif. Data akan dikategorikan dan temuan akan disusun untuk mengidentifikasi pola dan temuan utama. Kemudian data akan

¹⁴ H Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Salemba: Humanika, 2014).

¹⁵ L. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020).

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

¹⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial* (Jakarta: Referensi, 2013).



diverifikasi melalui triangulasi, dengan membandingkan hasil wawancara dan observasi untuk memastikan keakuratan dan keandalan temuan¹⁸.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Jaringan Sosial dan Kepercayaan sebagai Modal Sosial

Kolaborasi antara dua aktor lokal yaitu ketua RT dan panitia zakat desa Buluhcina dalam pendistribusian bantuan sangat dipengaruhi oleh kekuatan jaringan sosial dan tingkat kepercayaan masyarakat. Proses identifikasi penerima bantuan dilakukan dalam bentuk penetapan indikator fakir dan miskin melalui musyawarah bersama pihak pemerintah, panitia zakat dan tokoh agama dan masyarakat melalui mekanisme informal yang berbasis pengetahuan lokal, di mana relasi sosial memainkan peran sentral dalam menentukan siapa yang dianggap layak menerima bantuan. Praktik ini memungkinkan para aktor untuk lebih responsif terhadap kondisi konkret dan kebutuhan masyarakat setempat, serta memperkuat legitimasi sosial dari proses pendistribusian.

Dalam hal ini ketua RT lah yang memainkan peranan penting dalam menjalankan indikator fakir dan miskin yang telah ditetapkan dengan cara melihat dan menilai serta mengumpulkan dalam bentuk data penerima bantuan. Namun, analisis juga mengungkapkan adanya subjektivitas yang tinggi dalam proses seleksi, yang membuka ruang bagi potensi bias sosial dan ketidakterbukaan dalam pengambilan keputusan. Meskipun sistem ini meningkatkan sensitivitas lokal, keterbatasan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, hasil ini menekankan perlunya penggabungan antara pengetahuan lokal dengan sistem formal yang lebih objektif dan inklusif untuk menciptakan proses distribusi bantuan yang lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁸ Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Penerbit Aksara Timur, 2017).

Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya jaringan sosial dan kepercayaan sebagai fondasi utama dalam kolaborasi aktor lokal dalam proses distribusi bantuan¹⁹. Dalam konteks ini, praktik distribusi tidak hanya berlandaskan pada prosedur formal, tetapi juga sangat bergantung pada modal sosial yang terbentuk dari relasi interpersonal dan reputasi komunitas. Fenomena ini selaras dengan pemikiran Putnam mengenai modal sosial sebagai perekat sosial yang memungkinkan terwujudnya koordinasi dan kerja sama yang lebih efektif dalam komunitas. Namun, berbeda dari model-model formalistik dalam kebijakan distribusi sosial, sistem yang diamati dalam penelitian ini menunjukkan karakteristik adaptif yang tinggi terhadap konteks lokal. Dengan demikian, hasil ini merefleksikan suatu dinamika penting dalam tata kelola lokal: ketika kepercayaan dan kedekatan sosial menjadi alat validasi utama dalam pengambilan keputusan, efektivitas distribusi dapat meningkat secara kontekstual, tetapi dengan risiko bias yang sulit dikendalikan. Ini memperkuat pandangan dalam literatur *governance* bahwa pendekatan informal tidak sepenuhnya dapat dipertentangkan dengan sistem formal, melainkan perlu dipahami sebagai bentuk hibrida yang mencerminkan realitas sosiokultural masyarakat.

Lebih jauh, hasil penelitian mengungkap bahwa struktur sosial informal memainkan peran krusial dalam menentukan kelancaran distribusi bantuan di tingkat komunitas. Dalam banyak kasus, keberhasilan identifikasi penerima manfaat tidak semata ditentukan oleh kriteria administratif atau data formal, melainkan oleh pengetahuan personal yang dimiliki para aktor lokal tentang kondisi keseharian warga. Sistem ini memungkinkan keputusan diambil secara cepat, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan²⁰. Para aktor kunci sering kali

¹⁹ Emmy Prince, "Role of Social Capital in Community Development," *Journal of Advanced Sociology*, vol. 5, 2024.

²⁰ Shirin Madon, C. R. Ranjini, and R. K. Anantha Krishnan, "Aadhaar and Social Assistance Programming: Local Bureaucracies as Critical Intermediary," *Information*



mengandalkan pengamatan langsung, komunikasi antartetangga, serta ingatan kolektif komunitas dalam menetapkan daftar penerima bantuan. Namun, fleksibilitas yang dihasilkan dari pendekatan informal ini juga menyimpan potensi penyimpangan²¹. Penelitian mencatat beberapa indikasi terjadinya eksklusi sosial terhadap individu atau kelompok yang tidak memiliki hubungan kuat dengan jejaring sosial dominan, serta kecenderungan mengutamakan penerima yang “lebih dikenal” atau “lebih dekat secara emosional” oleh pelaksana lapangan.

Temuan ini beresonansi kuat dengan sejumlah studi sebelumnya yang menekankan efektivitas struktur sosial informal dalam konteks distribusi bantuan di komunitas lokal. Misalnya, dalam studi yang dilakukan oleh Mosse dan Platteau, mekanisme informal berbasis relasi personal dan pengetahuan lokal terbukti mampu menjangkau kelompok-kelompok marginal secara lebih tepat dibandingkan sistem formal yang kaku²². Struktur sosial yang cair memungkinkan aktor-aktor lokal merespons kondisi dinamis di masyarakat dengan cara yang tidak selalu mungkin dilakukan oleh sistem birokrasi yang seragam dan hierarkis. Namun demikian, studi-studi tersebut juga menggarisbawahi risiko laten dari pendekatan informal ini, terutama berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan eksklusi yang tersembunyi. Temuan dalam penelitian ini memperkuat narasi tersebut, sekaligus menambahkan dimensi baru: bahwa keberpihakan sosial dan subjektivitas tidak hanya berasal dari kekuasaan politik lokal, tetapi juga dari norma sosial yang mengatur siapa yang dianggap “pantas” untuk menerima bantuan berdasarkan kedekatan sosial, moralitas yang diasumsikan, atau loyalitas komunitas. Dengan demikian,

Technology for Development 28, no. 4 (2022): 705–20, <https://doi.org/10.1080/02681102.2021.2021130>.

²¹ Henio Millán Valenzuela, “Informalidad y Heterogeneidad Social” (Amerika, December 21, 2019).

²² Roberto Foa, “The Role of Social Institutions in Determining Aid Effectiveness” (Harvard, July 1, 2012), www.iss.nl.

efektivitas pendekatan informal tidak dapat dimaknai secara simplistik sebagai solusi yang lebih "manusiawi", melainkan harus dianalisis secara kritis sebagai arena distribusi kuasa dan nilai yang bersifat situasional. Ini menegaskan pentingnya desain kebijakan yang tidak hanya adaptif secara lokal, tetapi juga mampu menyeimbangkan antara fleksibilitas sosial dan prinsip keadilan prosedural.

2. Subjektivitas dan Selektivitas dalam Praktik Lapangan

Penelitian ini mengungkap bahwa proses identifikasi dan seleksi penerima bantuan di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh subjektivitas individu atau kelompok yang memiliki kewenangan informal dalam komunitas. Penentuan tidak hanya berdasarkan kondisi ekonomi objektif atau kriteria administratif formal, melainkan juga pada persepsi sosial, reputasi moral, serta relasi personal yang dibentuk di luar kerangka institusional²³. Dalam praktiknya, penerima bantuan sering kali dipilih berdasarkan "pengetahuan sosial" yang dibentuk oleh interaksi sehari-hari, penilaian terhadap sikap, dan tingkat partisipasi dalam kegiatan komunitas. Norma lokal yang tidak tertulis seperti kewajiban menghormati tokoh adat, menjaga keharmonisan lingkungan, atau loyalitas terhadap pemimpin informal mempengaruhi siapa yang dianggap pantas menerima bantuan. Akibatnya, terdapat kecenderungan selektivitas yang tidak selalu dapat dijelaskan secara transparan kepada pihak luar, termasuk kepada penerima yang tidak lolos seleksi. Situasi ini melahirkan ambiguitas, di mana keputusan yang tampak rasional di mata pelaku lokal bisa jadi dianggap diskriminatif atau tidak adil dalam perspektif institusional.

Temuan ini menyoroti bagaimana subjektivitas dalam pengambilan keputusan mencerminkan peran penting norma sosial yang bersifat implisit dan kontekstual dalam praktik *governance* lokal. Subjektivitas tersebut tidak semata-mata menunjukkan kelemahan sistem, tetapi juga

²³ Jeremy Armon, "Aid and Authoritarianism in Africa: Development without Democracy," *African Affairs*, March 14, 2017, 1–3, <https://doi.org/10.1093/afraf/adx010>.



merefleksikan bentuk diskresi (*discretion*) yang dimanfaatkan oleh pelaku lokal untuk menavigasi kompleksitas sosial dalam komunitasnya. Dalam literatur kebijakan publik, diskresi sering dipahami sebagai ruang kebebasan yang diberikan kepada aktor implementasi dalam menerjemahkan aturan ke dalam tindakan nyata²⁴. Namun dalam konteks ini, diskresi tidak diberikan secara formal oleh negara, melainkan diperoleh secara sosial melalui legitimasi komunitas dan posisi simbolik yang dimiliki oleh para pelaku lokal. Hal ini menciptakan arena pengambilan keputusan yang cair, di mana

pertimbangan moral, afiliasi sosial, dan persepsi kedekatan menjadi landasan dominan dalam distribusi sumber daya. Meskipun kondisi ini memperkuat sensitivitas terhadap dinamika lokal, ia juga membuka ruang bagi reproduksi ketimpangan tersembunyi dan bias afektif. Dengan demikian, praktik subjektif ini menggarisbawahi perlunya perancangan kebijakan yang memahami diskresi sebagai dimensi sosial yang tak terhindarkan, namun tetap harus diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang menjamin bahwa keputusan-keputusan informal tersebut tidak menjelma menjadi alat eksklusi sosial yang sistematis. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendekatan *governance* lokal perlu bersandar pada pemahaman sosiologis atas norma dan kekuasaan mikro, bukan semata-mata pada logika administratif yang formalistik.

3. Subjektivitas dan Selektivitas dalam Praktik Lapangan

Penelitian ini mengungkap bahwa proses identifikasi dan seleksi penerima bantuan di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh subjektivitas individu atau kelompok yang memiliki kewenangan informal dalam komunitas. Penentuan tidak hanya berdasarkan kondisi ekonomi objektif

²⁴ Anwar Sadat, "Discretion and Accountability of Local Government in Administering Governance," *Journal of Governance* 5, no. 2 (December 22, 2020), <https://doi.org/10.31506/jog.v5i2.9283>.

atau kriteria administratif formal, melainkan juga pada persepsi sosial, reputasi moral, serta relasi personal yang dibentuk di luar kerangka institusional²⁵. Dalam praktiknya, penerima bantuan sering kali dipilih berdasarkan "pengetahuan sosial" yang dibentuk oleh interaksi sehari-hari, penilaian terhadap sikap, dan tingkat partisipasi dalam kegiatan komunitas. Norma lokal yang tidak tertulis seperti kewajiban menghormati tokoh adat, menjaga keharmonisan lingkungan, atau loyalitas terhadap pemimpin informal mempengaruhi siapa yang dianggap pantas menerima bantuan. Akibatnya, terdapat kecenderungan selektivitas yang tidak selalu dapat dijelaskan secara transparan kepada pihak luar, termasuk kepada penerima yang tidak lolos seleksi. Situasi ini melahirkan ambiguitas, di mana keputusan yang tampak rasional di mata pelaku lokal bisa jadi dianggap diskriminatif atau tidak adil dalam perspektif institusional.

Temuan ini menyoroti bagaimana subjektivitas dalam pengambilan keputusan mencerminkan peran penting norma sosial yang bersifat implisit dan kontekstual dalam praktik *governance* lokal. Subjektivitas tersebut tidak semata-mata menunjukkan kelemahan sistem, tetapi juga merefleksikan bentuk diskresi (*discretion*) yang dimanfaatkan oleh pelaku lokal untuk menavigasi kompleksitas sosial dalam komunitasnya. Dalam literatur kebijakan publik, diskresi sering dipahami sebagai ruang kebebasan yang diberikan kepada aktor implementasi dalam menerjemahkan aturan ke dalam tindakan nyata²⁶. Namun dalam konteks ini, diskresi tidak diberikan secara formal oleh negara, melainkan diperoleh secara sosial melalui legitimasi komunitas dan posisi simbolik yang dimiliki oleh para pelaku lokal. Hal ini menciptakan arena pengambilan keputusan yang cair, di mana pertimbangan moral, afiliasi sosial, dan persepsi kedekatan menjadi landasan dominan dalam distribusi sumber daya. Meskipun kondisi ini memperkuat sensitivitas terhadap dinamika lokal, ia juga membuka ruang

²⁵ JEREMY ARMON, "Aid and Authoritarianism in Africa: Development without Democracy," *African Affairs*, March 14, 2017, 1–3, <https://doi.org/10.1093/afraf/adx010>.

²⁶ Anwar Sadat, "Discretion and Accountability of Local Government in Administering Governance," *Journal of Governance* 5, no. 2 (December 22, 2020), <https://doi.org/10.31506/jog.v5i2.9283>.



bagi reproduksi ketimpangan tersembunyi dan bias afektif. Dengan demikian, praktik subjektif ini menggarisbawahi perlunya perancangan kebijakan yang memahami diskresi sebagai dimensi sosial yang tak terhindarkan, namun tetap harus diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang menjamin bahwa keputusan-keputusan informal tersebut tidak menjelma menjadi alat eksklusi sosial yang sistematis. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendekatan *governance* lokal perlu bersandar pada pemahaman sosiologis atas norma dan kekuasaan mikro, bukan semata-mata pada logika administratif yang formalistik.

4. Ketegangan Antara Sensitivitas Lokal dan Transparansi

Penelitian ini menemukan adanya ketegangan nyata antara upaya mempertahankan sensitivitas terhadap konteks lokal dengan tuntutan terhadap transparansi dalam distribusi bantuan. Di satu sisi, aktor-aktor lokal seperti RT dan panitia zakat menunjukkan kemampuan adaptif dalam merespons kebutuhan masyarakat melalui pendekatan yang kontekstual, berbasis relasi dan pengetahuan mendalam atas kondisi sosial-ekonomi warga. Mekanisme ini memungkinkan proses distribusi yang lebih cepat dan terasa “adil” menurut persepsi lokal. Namun, di sisi lain, proses tersebut minim dokumentasi formal dan tidak memiliki standar prosedural yang terbuka untuk publikasi atau verifikasi. Tidak jarang, warga yang tidak terpilih tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai alasan di balik keputusan tersebut, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan dan potensi konflik horizontal. Ketika aspek fleksibilitas lokal lebih diutamakan daripada pencatatan administratif yang sistematis, ruang evaluasi dan pengawasan eksternal menjadi sangat terbatas²⁷. Ketegangan ini tampak paling jelas dalam perbedaan persepsi antara aktor lokal dan pengawas eksternal (masyarakat diluar aktor), di mana yang satu menekankan aspek kepercayaan dan nilai gotong royong, sedangkan yang lain menuntut pembuktian berbasis data dan prosedur.

²⁷ Henio Millán Valenzuela, “Informalidad y Heterogeneidad Social.”

Ketegangan antara sensitivitas lokal dan transparansi yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencerminkan dilema klasik dalam tata kelola sosial berbasis komunitas: bagaimana menyeimbangkan nilai-nilai kepercayaan dan fleksibilitas dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas²⁸. Dalam literatur *governance*, hal ini sering dirujuk sebagai konflik antara "*responsive governance*" dan "*rule-based governance*". Pendekatan berbasis lokal memiliki kekuatan dalam hal *responsivitas* yakni kemampuan aktor untuk memahami dan menyesuaikan kebijakan dengan realitas konkret komunitasnya. Ketika praktik ini berlangsung tanpa keseimbangan normatif, risiko terjadinya bias sosial, eksklusi tidak terlihat, dan manipulasi informal menjadi sangat tinggi²⁹. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi tidak harus bertentangan dengan sensitivitas lokal, tetapi memerlukan desain kelembagaan yang memungkinkan keduanya berinteraksi secara produktif. Artinya, penting untuk mengembangkan sistem pelaporan, dokumentasi, dan audit yang cukup lentur untuk mengakomodasi dinamika lokal, tetapi juga cukup kuat untuk menjamin hak atas informasi dan keadilan prosedural. Dalam hal ini pelaporannya dalam bentuk baliho besar nama pemberi dan penerima zakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa transparansi bukan semata persoalan teknokratik, melainkan sebuah tantangan etika dan politik yang menuntut integrasi antara logika komunitas dan logika institusi.

5. Pentingnya Integrasi Antara Pengetahuan Lokal dan Sistem Formal Yang Akuntabel dan Inklusif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pengetahuan lokal maupun sistem formal memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing dalam mendukung distribusi bantuan yang adil dan efektif. Pengetahuan lokal memungkinkan para pelaku di tingkat komunitas untuk melakukan seleksi penerima secara cepat, adaptif, dan sensitif terhadap konteks sosial terutama

²⁸ Madon, Ranjini, and Anantha Krishnan, "Aadhaar and Social Assistance Programming: Local Bureaucracies as Critical Intermediary."

²⁹ MIGDAD, "Managing Zakat Through Institutions: Case of Malaysia."



dalam situasi darurat atau ketika data formal tidak tersedia atau usang. Namun, tanpa adanya kerangka formal yang mengatur proses tersebut, muncul kelemahan dalam hal akuntabilitas, risiko bias sosial, dan ketiadaan mekanisme pengawasan yang jelas. Di sisi lain, sistem formal menawarkan standar yang objektif dan mekanisme audit yang lebih transparan, tetapi sering kali tidak mampu menjangkau dinamika sosial yang kompleks di tingkat lokal, sehingga menghambat efektivitas implementasi di lapangan³⁰. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya untuk memperbaiki tata kelola distribusi bantuan tidak dapat dilakukan hanya dengan memperkuat salah satu pendekatan, melainkan dengan mengintegrasikan keduanya. Dalam beberapa kasus, aktor lokal menunjukkan potensi untuk menjadi jembatan antara dua sistem ini, mengadaptasi kriteria formal melalui lensa sosial komunitas, dan sebaliknya, menerjemahkan informasi lokal ke dalam format administratif yang dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal.

Temuan ini mempertegas urgensi untuk membangun pendekatan hibrida yang menggabungkan kekuatan pengetahuan lokal dengan instrumen-instrumen tata kelola formal. Dalam kerangka teoretis, pendekatan ini sejalan dengan gagasan *co-production* dalam studi kebijakan publik dan pembangunan, di mana masyarakat lokal dan institusi formal bekerja bersama untuk merancang dan melaksanakan layanan publik yang responsif sekaligus dapat dipertanggungjawabkan³¹. Integrasi semacam ini tidak hanya memerlukan perangkat prosedural seperti form pelaporan, audit sosial, atau sistem data terpadu, tetapi juga membutuhkan ruang deliberatif yang memungkinkan aktor lokal terlibat secara bermakna dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan. Implikasinya bersifat struktural sekaligus normatif: sistem formal perlu direkayasa agar mampu

³⁰ Mardhiyah Hayati, "Peran Pemerintah Dan Ulama Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pendidikan Di Indonesia."

³¹ Moh Arifin, Uswatun Hasanah, and Ahlul Maghfiroh, "Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Di Masa Pandemi Covid-19," vol. 2, 2021.

menampung logika sosial yang berkembang di komunitas, sementara pelaku lokal juga perlu diberdayakan agar tidak hanya menjadi pengemban praktik tradisional, tetapi juga agen yang memahami prinsip transparansi dan inklusivitas. Dalam konteks distribusi bantuan, integrasi ini dapat diwujudkan melalui skema verifikasi berlapis, pelatihan berbasis hak, serta digitalisasi data lokal yang tetap menjaga otoritas komunitas dalam proses input³². Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan distribusi yang adil dan inklusif hanya dapat dicapai ketika sistem formal dan informal tidak saling meniadakan, tetapi dirancang untuk saling menguatkan melalui mekanisme kelembagaan yang adaptif, etis, dan kontekstual.

6. Kontribusi terhadap Teori Tata Kelola Partisipatif

Penelitian ini menemukan bahwa aktor non-formal seperti tokoh masyarakat, pemimpin informal, dan jejaring sosial lokal memainkan peran sentral dalam proses distribusi bantuan di tingkat mikro³³. Peran ini tidak terbatas pada pelaksanaan teknis, melainkan meliputi fungsi-fungsi strategis seperti identifikasi kebutuhan, seleksi penerima, dan mediasi konflik sosial. Bahkan tanpa otoritas formal, aktor-aktor ini memperoleh legitimasi dari komunitas berdasarkan kepercayaan, relasi historis, dan rekam jejak sosial. Distribusi bantuan menjadi arena interaksi sosial yang kompleks, di mana keputusan sering kali dipandu oleh norma-norma lokal yang tidak terdokumentasi secara resmi tetapi diakui dan ditaati secara luas.

Temuan ini memperluas batas pemahaman dalam teori tata kelola partisipatif, khususnya dengan menekankan peran *governance from below* yang dijalankan oleh aktor non-formal dalam konteks distribusi kesejahteraan. Sementara teori tata kelola partisipatif konvensional cenderung menekankan kolaborasi antara negara, pasar, dan masyarakat sipil dalam kerangka institusional formal, studi ini menunjukkan bahwa kapasitas tata kelola sering kali justru

³² Irsyad Andriyanto, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Kemiskinan," vol. 19, 2011, <http://www.rumahzakat.org>.

³³ Irsyad Andriyanto.



bersumber dari interaksi informal yang tidak diakomodasi oleh struktur formal³⁴. Dengan menampilkan bagaimana legitimasi dan efektivitas tata kelola dapat dibentuk melalui jaringan sosial berbasis kepercayaan, studi ini menggarisbawahi perlunya merevisi asumsi dalam teori partisipasi yang terlalu bertumpu pada prosedur formal dan mekanisme representatif. Aktor lokal dalam studi ini tidak hanya menjadi *pelaksana kebijakan*, melainkan turut membentuk norma, prosedur, dan kriteria dalam praktik distribusi sebuah kontribusi empiris yang menegaskan pentingnya mengakui keberadaan *endogenous governance institutions* dalam studi kebijakan publik.

7. Implikasi Praktis bagi Desain Intervensi Sosial

Dari sisi implementasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi sosial yang mengabaikan konfigurasi sosial lokal cenderung mengalami resistensi atau gagal menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa intervensi yang terlalu terpusat pada data administratif tidak mampu menangkap perubahan kondisi sosial-ekonomi secara cepat, sementara intervensi berbasis pengetahuan lokal menghadapi tantangan dalam menjamin keadilan dan objektivitas. Ketidakseimbangan ini berdampak pada kepercayaan publik terhadap proses distribusi, serta potensi terjadinya konflik atau kecemburuan sosial di tingkat komunitas.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa desain intervensi sosial perlu bersandar pada pemetaan aktor dan struktur sosial lokal secara cermat sebelum proses eksekusi kebijakan dilakukan. Intervensi yang berkelanjutan sebaiknya tidak hanya mengandalkan parameter teknokratik, melainkan juga mengadopsi prinsip *contextual fit*³⁵, yaitu kemampuan kebijakan untuk menyesuaikan diri dengan realitas sosial setempat. Dengan memahami siapa

³⁴ Mohamad Nor, Ishak, and Osman, "Developing An Effective Individual Amil Criteria."

³⁵ Prince, "Role of Social Capital in Community Development."

yang berpengaruh secara sosial dan bagaimana relasi kuasa lokal bekerja, intervensi dapat dirancang agar lebih inklusif dan responsif. Namun demikian, pendekatan ini juga perlu disertai dengan kerangka kerja yang mampu mengurangi ruang bagi bias, selektivitas, dan praktik nepotistik³⁶. Oleh karena itu, pelatihan etika distribusi, kode etik komunitas, serta penggunaan indikator yang disusun secara partisipatif menjadi elemen kunci untuk menjembatani efektivitas lokal dan prinsip keadilan universal.

8. Keterbatasan Data Kontekstual dan Subjektivitas Informan

Salah satu keterbatasan utama dalam studi ini berkaitan dengan sifat data kualitatif yang sangat dipengaruhi oleh subjektivitas informan. Meskipun pendekatan etnografis dan wawancara mendalam memberikan kedalaman pemahaman terhadap praktik sosial dan relasi kekuasaan di tingkat lokal, pandangan yang dikemukakan oleh para informan tidak selalu mewakili keseluruhan spektrum sosial dalam komunitas. Dalam beberapa kasus, narasi yang dominan berasal dari aktor-aktor yang memiliki posisi sosial lebih tinggi atau memiliki relasi kuat dengan peneliti lapangan, sementara kelompok marginal seperti perempuan kepala keluarga, difabel, atau warga tanpa afiliasi sosial yang kuat cenderung kurang terwakili dalam data³⁷. Bias representasi ini dapat memengaruhi konstruksi realitas sosial yang ditampilkan dalam hasil penelitian, terutama terkait dengan legitimasi aktor lokal dan persepsi atas keadilan distribusi bantuan.

Bias semacam ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga konseptual, karena ia menunjukkan bahwa dalam studi yang sangat mengandalkan informasi verbal, narasi yang terkuat bukan selalu yang paling benar atau paling relevan secara etis. Perspektif informan sangat dipengaruhi oleh posisi sosial mereka, pengalaman masa lalu, dan harapan terhadap distribusi bantuan, sehingga interpretasi terhadap siapa yang "layak" atau "tidak layak" menerima bantuan bisa mengandung logika

³⁶ Mardhiyah Hayati, "Peran Pemerintah dan Ulama Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan Di Indonesia."

³⁷ migdad, "Managing Zakat Through Institutions: Case of Malaysia."



moral lokal yang problematik jika tidak dikritisi. Oleh karena itu, meskipun hasil studi ini menyajikan gambaran yang kaya tentang praktik lokal, pembaca perlu memahami bahwa data yang digunakan tidak bersifat objektif netral, melainkan representasi dari dinamika sosial yang penuh ketegangan dan bias perseptual.

Keterbatasan lain yang penting dicatat adalah sifat kontekstual dari temuan penelitian ini, yang membatasi daya generalisasinya ke konteks atau komunitas lain. Studi ini dilakukan di wilayah dengan karakteristik sosial, historis, dan institusional tertentu, di mana kepercayaan terhadap aktor lokal masih relatif tinggi dan struktur sosial bersifat cukup tertutup. Dalam konteks yang lebih urban, lebih heterogen, atau memiliki tingkat mobilitas sosial yang tinggi, logika distribusi bantuan berbasis jejaring sosial dan kepercayaan personal seperti yang ditemukan dalam studi ini mungkin tidak relevan atau bahkan kontraproduktif³⁸. Oleh karena itu, meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mikro tentang tata kelola sosial, pembaca dan pembuat kebijakan perlu berhati-hati dalam menerapkan temuan ini secara luas tanpa mempertimbangkan adaptasi kontekstual yang memadai.

Generalitas temuan juga dipengaruhi oleh desain penelitian yang tidak bersifat komparatif lintas wilayah. Tanpa adanya pembandingan dari komunitas dengan konfigurasi sosial berbeda, sulit untuk menentukan apakah mekanisme distribusi yang ditemukan merupakan fenomena umum atau justru khas dari lokasi studi. Keterbatasan ini membuka ruang untuk penelitian lanjutan yang mengadopsi pendekatan komparatif atau longitudinal, sehingga memungkinkan analisis terhadap variabel

³⁸ Lahat, Klenk, and Pitowsky-Nave, "Street-Level Bureaucrats as Policy Entrepreneurs and Collaborators: Findings from Israel and Germany."

kontekstual yang mempengaruhi pola tata kelola lokal secara lebih luas dan sistematis.

9. Kurangnya Pemanfaatan Data Digital atau Objektif

Studi ini juga memiliki keterbatasan dalam aspek metodologis, khususnya terkait minimnya pemanfaatan data kuantitatif atau sumber data objektif seperti pemetaan digital, catatan administratif, atau sistem informasi geografis (GIS). Padahal, integrasi data digital dapat berfungsi sebagai alat verifikasi independen terhadap klaim-klaim subjektif yang muncul dalam wawancara atau observasi partisipatif. Misalnya, penggunaan data spasial dan demografis dapat membantu mengevaluasi apakah distribusi bantuan mencerminkan kebutuhan aktual berdasarkan tingkat kerentanan objektif di setiap wilayah RT atau dusun.

Keterbatasan ini membuat penelitian bergantung hampir sepenuhnya pada narasi sosial dan persepsi pelaku lokal, sehingga ruang untuk menguji validitas distribusi secara sistematis menjadi terbatas³⁹. Dalam konteks di mana keadilan distribusi menjadi isu utama, penggunaan teknologi digital semestinya menjadi pelengkap yang penting bagi analisis kualitatif, bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai mekanisme triangulasi yang memperkuat validitas temuan⁴⁰. Di masa depan, penelitian serupa akan memperoleh manfaat besar jika menggabungkan metodologi campuran (*mixed methods*) yang tidak hanya mengandalkan penuturan informan, tetapi juga memanfaatkan data digital, statistik lokal, dan sistem monitoring berbasis komunitas.

³⁹ El Ayyubi et al., "Peran Zakat Terhadap Proses Perubahan Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Narrative Dan Bibliometrics."

⁴⁰ Georg Von Schnurbein, "Foundations Building Social Capital *," n.d., <http://ssrn.com/abstract=1467500>Electroniccopyavailableat:<https://ssrn.com/abstract=1467500>Electroniccopyavailableat:<http://ssrn.com/abstract=1467500>.



D. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa distribusi bantuan sosial di tingkat komunitas sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial lokal, khususnya jaringan kepercayaan dan relasi interpersonal antaraktor. Kolaborasi antara Ketua RT dan panitia zakat menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, tata kelola yang bersandar pada struktur sosial informal dapat meningkatkan sensitivitas terhadap kondisi riil warga yang membutuhkan. Namun, praktik ini tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan potensi bias sosial. Subjektivitas dalam penentuan penerima bantuan sering kali mencerminkan norma-norma lokal yang tidak tertulis, namun hal tersebut juga membuka ruang bagi terjadinya eksklusi sosial dan praktik diskriminatif yang tidak terdeteksi oleh sistem formal.

Kontribusi utama studi ini adalah pada perluasan pemahaman mengenai tata kelola partisipatif di tingkat mikro, dengan menekankan peran signifikan kedua aktor lokal ini dalam merancang dan mengeksekusi kebijakan kesejahteraan. Studi ini juga merekomendasikan integrasi pendekatan berbasis kepercayaan lokal dengan sistem formal yang lebih objektif dan digital, sebagai upaya untuk menjawab tantangan keadilan distribusi secara lebih sistemik. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan arah baru dalam desain intervensi sosial, yakni melalui hibridisasi tata kelola yang tidak mengabaikan logika sosial lokal, tetapi juga tidak membiarkan subjektivitas berjalan tanpa batas pengawasan.

Daftar Pustaka

- Ach. Muhandis Mutiuddin, Ahmad Afif Amrullah, Uswatun Chasanah. "Analisis Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Di Lazisnu Jawa Timur." *Jurnal ekonomi syariah darussalam* 5, no. 1 (2024): 64–81.
- Arifin, Moh, Uswatun Hasanah, and Ahlul Maghfiroh. "Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Di Masa Pandemi Covid-19." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* Vol. 2, 2021.
- ARMON, JEREMY. "Aid and Authoritarianism in Africa: Development without Democracy." *African Affairs*, March 14, 2017, 1–3. <https://doi.org/10.1093/afraf/adx010>.
- Ayyubi, Salahuddin El, Ekawati Wahyuni, Pudji Muljono, and Irfan Syauqi Beik. "Peran Zakat Terhadap Proses Perubahan Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Narrative Dan Bibliometrics." *Al-Muzara'ah* 11, no. 1 (June 26, 2023): 63–85. <https://doi.org/10.29244/jam.11.1.63-85>.
- Bagong Suyanto dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2006.
- Haris, Muhammad. "Interaksi Sosial Dan Jaringan Ekonomi Pedagang Kaki Lima Dalam Konteks Perubahan Ekonomi Lokal." *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat* 9, no. 1 (2024): 84–98.
- . "Problematika Pemberdayaan Masyarakat Miskin." *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa* 2, no. 1 (2019): 46–63.
- Henio Millán Valenzuela. "Informalidad y Heterogeneidad Social." *Amerika*, December 21, 2019.
- Herdiansyah, H. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba: Humanika, 2014.
- Irsyad Andriyanto. "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Kemiskinan." *STAIN Kudus* Vol. 19, 2011.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Jakarta: Referensi, 2013.



- Lahat, Lihi, Tanja Klenk, and Noga Pitowsky-Nave. "Street-Level Bureaucrats as Policy Entrepreneurs and Collaborators: Findings from Israel and Germany." *European Policy Analysis* 9, no. 4 (November 1, 2023): 397–417. <https://doi.org/10.1002/epa2.1173>.
- Madon, Shirin, C. R. Ranjini, and R. K. Anantha Krishnan. "Aadhaar and Social Assistance Programming: Local Bureaucracies as Critical Intermediary." *Information Technology for Development* 28, no. 4 (2022): 705–20. <https://doi.org/10.1080/02681102.2021.2021130>.
- Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit Aksara Timur, 2017.
- Mardhiyah Hayati. "Peran Pemerintah Dan Ulama Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pendidikan Di Indonesia." *Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung*, March 23, 2014, 1–9.
- Maulana Anshori, Ahmad, Muhammad Haris, and Bayu Indra Laksana. "Digitalisasi Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Berbasis Potensi Lokal," *Dakwatul Islam* Vol 9 N0 2 2025, 222-249
- MIGDAD, Abdalrahman. "Managing Zakat Through Institutions: Case of Malaysia." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 1 (2019): 28–44. <https://doi.org/10.25272/ijisef.519228>.
- Mohamad Nor, Mohamad Naimi, Suhaimi Ishak, and Amirul Faiz Osman. "Developing An Effective Individual Amil Criteria." *International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam* 3, no. 6 (March 31, 2021): 38–44. <https://doi.org/10.35631/irjsmi.36004>.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Prince, Emmy. "Role of Social Capital in Community Development." *Journal of Advanced Sociology*. Vol. 5, 2024.
- Roberto Foa. "The Role of Social Institutions in Determining Aid Effectiveness." Harvard, July 1, 2012. www.iss.nl.

- Roziq, Ahmad, Yulinartati, and Norita Citra Yuliarti. "Model Of Productive Islamic Social Fund Management For Poor Empowerment." *International Journal of Professional Business Review* 7, no. 5 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i5.e597>.
- Sadat, Anwar. "Discretion and Accountability of Local Government in Administering Governance." *Journal of Governance* 5, no. 2 (December 22, 2020). <https://doi.org/10.31506/jog.v5i2.9283>.
- Schnurbein, Georg Von. "Foundations Building Social Capital *," n.d. <http://ssrn.com/abstract=1467500>Electroniccopyavailableat:<https://ssrn.com/abstract=1467500>Electroniccopyavailableat:<http://ssrn.com/abstract=1467500>.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.